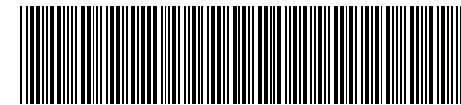




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526737/2025**



DS:6074-3174-0220-8509

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 05

Tanggal : 07 Oktober 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
- Sebesar : Rp. 91.800.000 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

	Jumlah Uang
Rp.	91.800.000
Rp.	91.800.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	91.800.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 91.800.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6074-3174-0220-8509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			91.800.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			91.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		6. 02	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		7. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		8. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		9. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		10. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		11. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		12. 08	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	5,00	kegiatan	75.200.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	3,00	kegiatan	42.200.000
		02	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	9.660.000
		03	AEA.003 Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1,00	kegiatan	23.340.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	48,00	Orang	16.600.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	48,00	Orang	16.600.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6074-3174-0220-8509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : I A. 2

Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Orang

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6074-3174-0220-8509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Kewenangan : (KD)

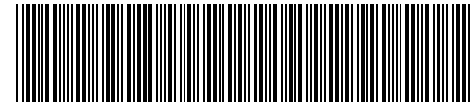
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526737	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	-	91.800	-	-	-	91.800		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	91.800	-	-	-	91.800		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	91.800	-	-	-	91.800		
1059.AEA	Koordinasi (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	75.200	-	-	-	75.200	23 . 51	
01	RM	-	75.200	-	-	-	75.200	038@	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	16.600	-	-	-	16.600	23 . 51	
01	RM	-	16.600	-	-	-	16.600	038	
JUMLAH		-	91.800	-	-	-	91.800		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6074-3174-0220-8509

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526737	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	3.384	21.713	2.600	1.200	11.870	1.200	45.033	91.800
		BELANJA BARANG	0	1.200	1.200	1.200	1.200	3.384	21.713	2.600	1.200	11.870	1.200	45.033	91.800
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	1.200	1.200	1.200	1.200	3.384	21.713	2.600	1.200	11.870	1.200	45.033	91.800
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	3.384	21.713	2.600	1.200	11.870	1.200	45.033	91.800
		PERKIRAAN PENERIMAAN	75	75	75	75	75	75	85	75	75	75	75	88	923
		- PNBP (425232)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
		- PNBP (425233)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	160
		- PNBP (425239)	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	71	753

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6074-3174-0220-8509

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [526737] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
526737	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 34.100 52 Belanja Barang Rp. 34.100		
005.05.BF 1059	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		
1059.AEA	Koordinasi 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.380 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 720 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6074-3174-0220-8509

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [526737] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775